

Peran Dinas Pariwisata terhadap Pengembangan Wisata Halal di Kota Makassar

Hasrianti¹, Trino Wardy Putra², Ayu Ruqayyah Yunus³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3}

Email: Hasrhianthy@gmail.com*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini mengangkat masalah tentang Peran Dinas Pariwisata Terhadap Pengembangan Wisata Halal di Kota Makassar. Pokok masalah penelitian yaitu 1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Terhadap Pengembangan Wisata Halal di Kota Makassar? 2. Apa Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Parawisata Halal di Kota Makassar? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan di antaranya observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data kemudian menggunakan instrument penelitian sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan terhadap pengembangan wisata halal di Kota Makassar diantaranya: a) Motivator b) Fasilitator, c) Dinamisator. Adapun Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan parawisata halal di Kota Makassar. Faktor Pendukung meliputi a) Pentahelix Pariwisata, b) Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan c) Fasilitas beribadah umat muslim yang lengkap 2) Faktor Penghambat meliputi a) Kurangnya anggaran dana, b) Infrastruktur yang tidak memadai, c) Keterbatasan lahan parkir khususnya di daerah dataran tinggi dan d) Transportasi ke tempat wisata belum ada, e) Medical center (pusat layanan kesehatan) belum memadai.

Kata Kunci: Wisata Halal, Dinas Pariwisata, Kota Makassar

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari keanekaragaman hayati, cagar alam, peninggalan sejarah dan budaya. Berlimpahnya sumber daya alam dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan

baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola sumber daya.¹

¹ Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia", Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 12, Nomor 1, 2020, h. 1

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, di samping bernilai ekonomi yang tinggi pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu, di sisi lain juga dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengembangan sektor di industri pariwisata.²

Perkembangan pariwisata secara berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah yang membawa perkembangan yang sangat cepat. Potensi wisata yang beraneka ragam yang tersebar disetiap daerah tujuan pariwisata dilestarikan dan dikembangkan, karena dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi pelestarian budaya, perekonomian, peningkatan pendidikan dan agama. Selain itu, perkembangan destinasi pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.³

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah islam.⁴ Pariwisata syariah atau biasa

diistilahkan wisata halal, bukan hanya mencakup wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri didalamnya seperti, restoran/usaha penyedia makan dan minum, biro perjalanan wisata syariah serta hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke life style yang dapat berupa rumah sakit, rekreasi, perawatan dan lain sebagainya.⁵ Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan Negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan pariwisata syariah dan industri jasa syariah, sehingga Indonesia dapat menanamkan bahwa pariwisata syariah identik dengan Negara Indonesia didalam mindset pariwisata dunia.⁶

Sulawesi Selatan memiliki beberapa pengembangan wisata salah satunya yang ada di Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi tersebut antara lain keindahan alam seperti Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Bayang, Pulau Gusung dan lainnya. Berbagai jenis pariwisata telah dikembangkan dengan baik. Adapun jenis wisata yang dapat dikunjungi di Kota Makassar adalah Wisata Budaya seperti Fort Rotterdam, Museum La Galigo, Museum Kota Makassar, Museum Monument Mandala Pembebasan Irian Barat dan wisata

tantangan". Journal of halal product and research (JHPR), Vol.01, No.02, Mei-November 2018

² Nidya Waras Sayekti, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia". Kajian Vol. 24 No. 3 September 2019, h. 160-161

³ Mei Sari, "Analisis Pengembangan Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam", (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020)

⁴ Eka Dewi Satriani dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata halal : perkembangan , peluang, dan

⁵ Rahma Dira Ismail, M. Fachri Adnan. "Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Wisata Halal". Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Volume 2 | Nomor 2 | Tahun 2020 ISSN : 2684-818X (Online).

⁶ Kurnia Maulida, dan Achamad Zurohman, "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): "Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industry 4.0," AQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 281.

Religi seperti Masjid 99 Kubah, Masjid Amirul Mukminin, Masjid Raya Makassar. Serta Dinas Kota Makassar telah menyediakan wisata buatan seperti Wisata Trans Studio Makassar, Bugis Water Park, Gowa Discovery Park Makassar. Berdasarkan dari hal tersebut, menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki potensi wisata yang cukup besar sehingga berpeluang untuk dikembangkan menjadi wisata halal.⁷

Dalam mengembangkan wisata halal di Kota Makassar, Dinas Pariwisata memiliki peran yang sangat signifikan. Dinas Pariwisata berperan penting sehingga dalam merumuskan kebijakan strategis pada bidang pariwisata dan kebudayaan, seperti strategi pengembangan produk, strategi pemasaran dan promosi sebagai upaya dalam mengembangkan objek wisata halal di Kota Makassar. Selain itu, Dinas Pariwisata bertanggungjawab dalam pembinaan dan pembimbingan pada pelaku usaha pariwisata dan budaya di Kota Makassar.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Peran Dinas Pariwisata terhadap Pengembangan Wisata Halal di Kota Makassar”

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Lokasi penelitian ini di Kota Makassar selanjutnya jenis data yang di gunakan yaitu data primer dan sekunder, dan menggunakan instrumen penelitian, selanjutnya tehnik pengumpulan data, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁷ Rindi Rahmawati, “Analisis Implementasi Magetan The Beaty Of Java Oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Magetan”, (Magetan : 2020), h. 6

⁸ Untung Sri Harjandto dan Amalia Diamantina, “Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Cilacap”. *Dipenogoro Journal*, vol. 6, No. 2, 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terhadap Pengembangan Wisata Halal di Kota Makassar

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Makassar mengembangkan sektor pariwisata melalui pelaksanaan program wisata halal. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Wisata Halal terdapat indikator khusus yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program wisata halal yaitu terkait dengan pengolahan destinasi pariwisata, penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program wisata halal serta kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Menurut Pitana dan Gayatri Peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi daerah pariwisata yaitu: 9

Adapun peran Dinas Pariwisata yaitu:

1. Motivator

Motivator dalam pengelolaan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk bergerak mengelola dan mengembangkan potensi Kota Makassar sebagai objek wisata Halal yang potensial. Motivasi dirasa perlu karena masyarakat harus didorong supaya lebih mengerti kemana arah pembangunan dan pengelolaan objek wisata alam tersebut. diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Penanam modal merupakan inti yang perlu diberikan motivasi agar

⁹ I G Pitana dan Gayatri P.G. *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: penerbit Andi, 2005), h. 95

perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan maksimal. Adapun programnya yaitu:

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Fasilitator

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan atau menyediakan fasilitas dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai pengelola objek wisata. Dinas Pariwisata melanjutkan perannya yang kedua yaitu sebagai fasilitator. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata Kota Makassar memberikan pengarahannya kepada masyarakat tentang penggunaan teknis, strategi, dan pelaksanaan dalam program yang bermanfaat bagi pengembangan potensi wisata halal di Kota Makassar.

Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahannya secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Parawisata Halal di Kabupaten Gowa

Adapun Faktor Pendukung dalam pengembangan pariwisata halal yaitu:

Fasilitas Beribadah Umat Muslim yang Lengkap

Pengelolaan wisata yang baik, keramahan masyarakat sekitar terhadap pelayanan wisatawan yang sesuai syariah Islam.

Mudahnya akses informasi dan akses transportasi umum/pribadi bagi wisatawan untuk menuju wisata halal di Kota Makassar

2) Faktor Penghambat meliputi a) Kurangnya anggaran dana, b) Kurangnya papan petunjuk arah dan peta lokasi mengenai objek wisata halal di Kota Makassar c) Keterbatasan lahan parkir d) Kurangnya Kebersihan Tempat Ibadah Muslim, e) Belum adanya pengawasan mengenai larangan pemakaian pakaian yang tidak Islami di sekitar kawasan wisata halal. f) Kondisi Cuaca Alam g) Belum tersedianya medical center (pusat layanan kesehatan) di sekitar tempat wisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sudah rangkum, maka peneliti menyimpulkan bahwa Peran Dinas Pariwisata terhadap Pengembangan Wisata Halal di Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut:

Peran dinas pariwisata terdapat beberapa Program wisata halal dapat di simpulkan beberapa aspek diantaranya, a) sebagai motivator. b) sebagai fasilitator, c) sebagai dinamisator.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan parawisata halal di Kota Makassar.

a) Faktor Pendukung meliputi: 1. Fasilitas beribadah umat muslim yang lengkap. 2. Pengelolaan wisata yang baik, keramahan masyarakat sekitar terhadap pelayanan wisatawan yang sesuai syariah Islam. 3. Mudahnya akses informasi dan akses transportasi umum/pribadi bagi wisatawan untuk menuju wisata halal di Kota Makassar. b) Faktor Penghambat meliputi: 1) Kurangnya anggaran dana, 2) Kurangnya papan petunjuk arah dan peta lokasi mengenai objek wisata halal di Kota Makassar. 3) Keterbatasan lahan parkir, 4) Kurangnya kebersihan tempat ibadah Muslim. 5) Belum adanya pengawasan mengenai larangan pemakaian pakaian yang tidak Islami di sekitar kawasan wisata halal. 6) Kondisi Cuaca Alam

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, dan Hery Sucipto. Adenisa Aulia Rahma, “Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 12, Nomor 1, 2020, h. 1
- Nidya Waras Sayekti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia”. *Kajian* Vol. 24 No. 3 September 2019, h. 160-161
- Mei Sari, “Analisis Pengembangan Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam”, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Eka Dewi Satriani dan Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata halal : perkembangan , peluang, dan tantangan”. *Journal of halal product and research (JHPR)*, Vol.01, No.02, Mei-November 2018
- Rahma Dira Ismail, M. Fachri Adnan. “Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Wisata Halal”. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP)* Volume 2 | Nomor 2 | Tahun 2020 ISSN : 2684-818X (Online).
- Kurnia Maulida, dan Achamad Zurohman, “Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): “Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industry 4.0,” *AQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 281.
- Rindi Rahmawati, “Analisis Implementasi Magetan The Beaty Of Java Oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Magetan”, (Magetan : 2020), h. 6
- Untung Sri Harjandto dan Amalia Diamantina, ”Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Cilacap”. *Dipenogoro Journal*, vol. 6, No. 2, 2017.
- Isdarmanto, “Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata”. (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2016), h. 24
- Alister Mathieson and Geoffrey Wall. “Tourism: Economic, Physical and Social Impact”. New York. Longman Scientific and Technical 2015, h. 9
- Davud Beny, “Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi”, Jakarta:Rajawali, 2015, h. 26-27
- Sarlito Wirawan Sarwono, “Teori-teori Psikologi Sosial”, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 215.
- Rahmawati, Op.cit,
- Mohamed Battour dan Ismail. 2016.” HalalTourism: Concepts, Practises, Challenges and Future”. *Tourism Management perspective*. 19: 150-154
- Tohir Bawazir, 2013, “Panduan Praktis Wisata Syariah”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 21-22.
- Nidya Waras Sayekti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia”, *Kajian* Vol. 24 No. 3 September 2019, h.160-161
- Muhammad Ghafur Wibowo. “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukit tinggi)”,